



LAPORAN KINERJA

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Triwulan II
Tahun
2026

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH)

Ketua Tim Penyusun

Kepala Sub Bagian Umum

Anggota Tim Penyusun

Subkoordinator Kelompok Tata Operasional

Subkoordinator Kelompok Tata Usaha

Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis

Sekretariat

Shella Savitri

Galuh Laksita Swasti

Ipan Dahniar

Kontributor

Ifana Agustina

Fitri Rahmawati

Dewinta Hesti Widyastantri

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat ijin dan rahmat-Nya penyusunan buku **"Laporan Kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) Triwulan II Tahun Anggaran 2026"** dapat diselesaikan pada waktunya.

Laporan ini merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas BRBIH dalam melaksanakan Program Perikanan budidaya ikan hias untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas pokok dan fungsinya erat kaitannya terselenggaranya *good governance* yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja TA 2026. Laporan ini sangat penting dan diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja organisasi pada Triwulan II Tahun 2026. Capaian Kinerja ini dapat tercapai berkat dukungan dan kerja keras dari seluruh jajaran pegawai BRBIH baik instuktur, fungsional lain dan personil manajerial. Diharapkan pada tahun 2026 kegiatan-kegiatan yang diamanatkan pada BRBIH dapat terlaksana secara optimal sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026 ini, atas tenaga dan pikirannya sehingga laporan ini dapat disusun dan diterbitkan. Kami membuka sekiranya jika ada saran dan masukan yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan laporan ini di masa yang akan datang.



Depok, 20 Juli 2026
Kepala BRBIH

Gleni Hasan Huwoyon

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Keragaan SDM.....	4
E. Sistematika Laporan Kinerja	6
F. Potensi dan Permasalahan.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2026.....	13
C. Perjanjian Kinerja	15
D. Pengukuran Kinerja	18
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	44
IV. PENUTUP	51
A. Capaian Kinerja.....	51
C. Permasalahan dan Rekomendasi.....	54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026.....	vii
Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias	10
Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029	12
Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2026	13
Tabel 5. Rincian Revisi DIPA	13
Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026.....	16
Tabel 7. Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026.....	17
Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2026	20
Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator 1	21
Tabel 10. Bobot Nilai IKPA 2026	25
Tabel 11. Kategori Nilai IKPA.....	25
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 2.....	26
Tabel 13. Bobot Variabel Penilaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	29
Tabel 14. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	29
Tabel 15. Capaian Kinerja IK 5	32
Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 7.....	38
Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2026	44
Tabel 18. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2026	45
Tabel 19. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2026	47
Tabel 20. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2026	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dashboard Kinerja Level 3 BRBIH	vi
Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH	4
Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2026	5
Gambar 4. Status Indeks capaian IKK	18
Gambar 5. <i>Dashboard</i> Kinerja BRBIH Tahun 2026	19
Gambar 6. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2026	31
Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025	31
Gambar 8. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025.....	31
Gambar 9. Kategori Nilai IP ASN.....	32
Gambar 10. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian	33
Gambar 11. Dashboard Kinerja BRBIH level 3 BRBIH	51

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan visi dan misi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH), pada bulan Januari 2026 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BRBIH dengan Plt. Sekretaris BPPSDMKP sebagai dasar pelaksanaan dan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dalam perjanjian kinerja tersebut ditetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) yang dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja BRBIH Tahun 2026.

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) pada perspektif yang telah ditetapkan. Proses pencatatan dan pengukuran kinerja dilaksanakan melalui aplikasi Kinerjaku KKP (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, BRBIH mencatat Nilai Kinerja Organisasi sebesar 114,82%, yang menunjukkan capaian kinerja sangat baik. Secara keseluruhan, dari 4 indikator kinerja yang diukur dari 9 IK yang diperjanjikan, terdapat 1 indikator dengan notifikasi hijau dan 3 indikator dengan notifikasi biru, yang menggambarkan ketercapaian target kinerja secara optimal sebagaimana dashboard kinerja berikut:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 1. Dashboard Kinerjaku Level 3 BRBIH

Pada triwulan II 2026 ini kinerja BRBIH diukur pada 4 IKM. Capaian tersebut mencakup aspek tindak lanjut rekomendasi Itjen yang dimanfaatkan, nilai IKPA, IP ASN dan RUP yang diumumkan, sebagaimana data berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	CAPAIAN TRIWULAN II 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026						114,82
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1	83	100	120
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1	76	90,66	119,29
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BRBIH pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai Rp. 4.458.772.984,- atau 51,97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 8.579.148.000,-. Tingkat penyerapan anggaran tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BRBIH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, serta diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam

upaya peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH di masa mendatang. BRBIH berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.



Bab 1

Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- b) Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
- e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- f) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- g) Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor 206 Tahun 2024 tentang Unit Organisasi Pembina Administrasi dan Teknis Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Balai Riset Budidaya Ikan Hias sebagai salah satu instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja BRBIH dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Laporan Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap performa kinerja yang dicapai BRBIH

serta sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja BRBIH guna memperbaiki kinerjanya di masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, lingkup penyusunan laporan kinerja ini adalah menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi BRBIH, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/ kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja BRBIH merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BRBIH untuk meningkatkan kinerja.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 77/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, BRBIH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM).

BRBIH mempunyai tugas melaksanakan riset budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut berdasarkan lingkungan fisik, dengan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset budidaya ikan hias;
2. Pelaksanaan riset perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut meliputi perbenihan dan sistem, reproduksi, domestikasi dan pemuliaan sumber daya plasma nutfah Ikan hias, nutrisi dan teknologi pakan, sistem ikan, lingkungan, serta teknologi budidaya ikan hias;

3. Pengembangan teknologi perikanan budidaya ikan hias air tawar, ikan hias air payau, dan ikan hias air laut;
4. Pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama riset;
5. Pengelolaan prasarana dan sarana riset; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Dalam menjalankan fungsi tersebut BRBIH di dukung oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas sebagaimana berikut:

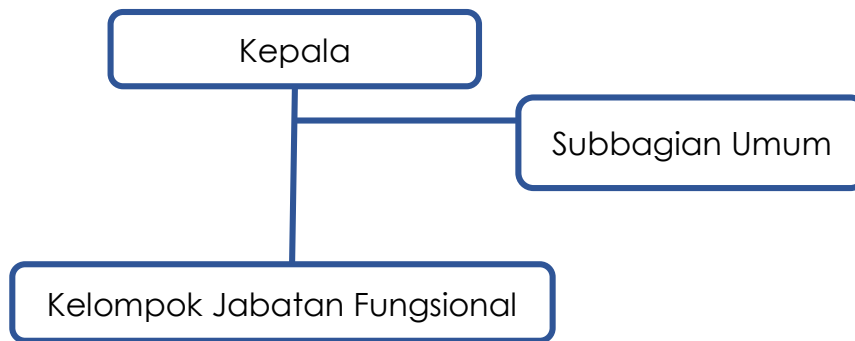
a. Subbagian Umum

Subbagian umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kepala BRBIH dengan tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

Struktur organisasi BRBIH sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 77/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias, sebagai berikut:

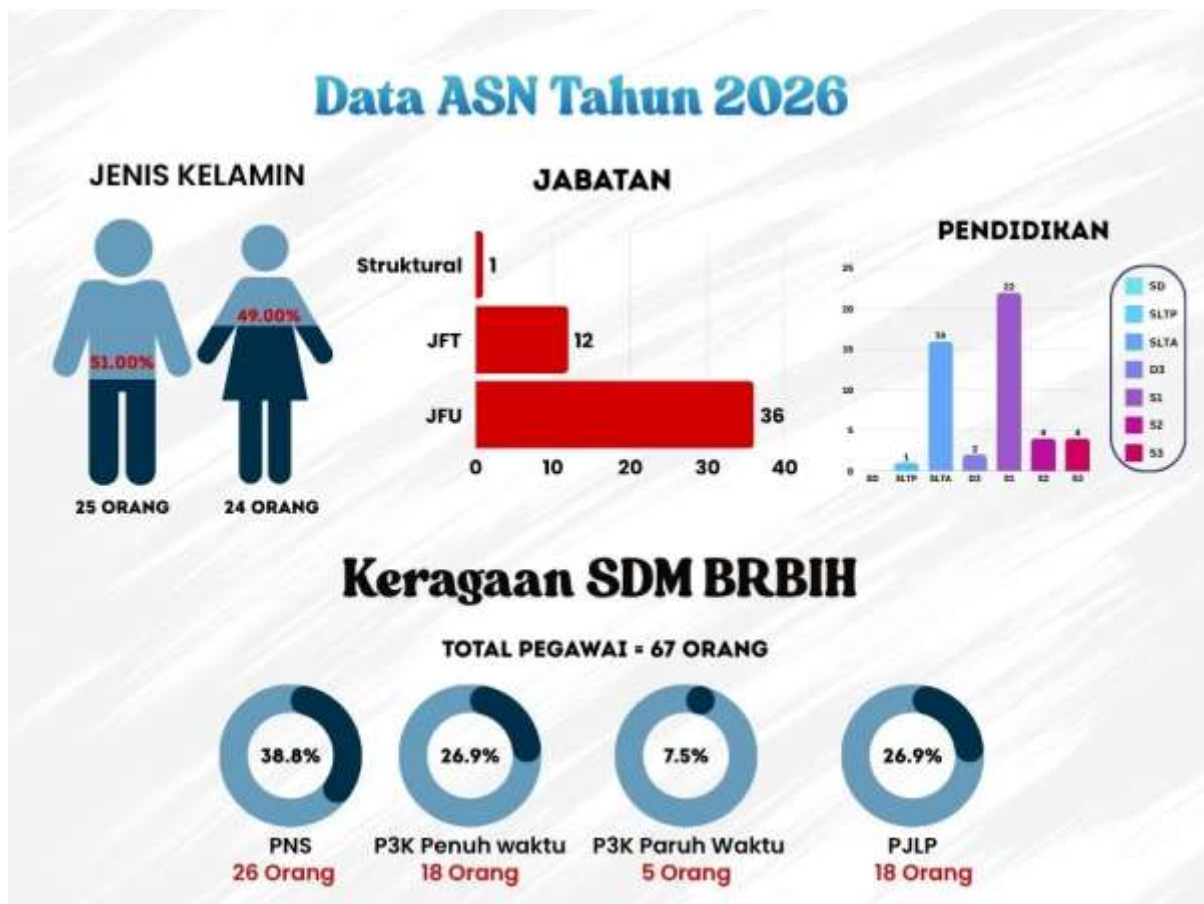


Gambar 2. Struktur Organisasi BRBIH

D. Keragaan SDM

Keberhasilan pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja BRBIH tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki komposisi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. SDM merupakan aset utama dalam penyelenggaraan fungsi penelitian, pelayanan publik, serta dukungan manajemen, sehingga pengelolaannya menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, BRBIH senantiasa melakukan pengelolaan SDM secara terencana melalui pengembangan kompetensi, pembinaan disiplin, serta penataan organisasi agar mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Pada akhir Triwulan II Tahun 2026, BRBIH didukung oleh 65 orang pegawai, yang terdiri atas 47 orang ASN dan 18 orang PJLP. Komposisi SDM tersebut mencakup berbagai jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan status kepegawaian yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BRBIH. Adapun gambaran komposisi SDM BRBIH pada akhir Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3 . Komposisi Pegawai BRBIH Tahun 2026

Berdasarkan infografis Data ASN BRBIH Tahun 2026, jumlah sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BRBIH pada akhir Triwulan II Tahun 2026 sebanyak 67 orang, yang terdiri atas 49 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) (26 PNS, 18 PPPK, 5 PPPK Paruh Waktu) dan 18 orang Pegawai Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Dari sisi jenis kelamin, komposisi pegawai relatif seimbang, yaitu 24 orang laki-laki (51%) dan 23 orang perempuan (49%) pada kelompok ASN, sehingga menunjukkan keterwakilan gender yang proporsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Berdasarkan jabatan, komposisi ASN didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 36 orang, diikuti Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sebanyak 12 orang, dan 1 orang pejabat struktural. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas organisasi lebih banyak didukung

oleh pegawai pelaksana dan pejabat fungsional yang berperan langsung dalam penyelenggaraan layanan administrasi maupun teknis.

Dari aspek tingkat pendidikan, sebagian besar ASN BRBIH telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, dengan dominasi lulusan Strata 1 (S1) sebanyak 21 orang, diikuti lulusan SLTA sebanyak 16 orang, Strata 2 (S2) sebanyak 5 orang, Strata 3 (S3) sebanyak 4 orang, Diploma III (D3) sebanyak 1 orang, serta masing-masing 1 orang berpendidikan SD dan SLTP. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa BRBIH memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi, sekaligus menjadi modal dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan.

Apabila dilihat berdasarkan status kepegawaian, SDM BRBIH terdiri atas 26 orang PNS (38,5%), 18 orang PPPK penuh waktu (27,7%), 5 orang PPPK paruh waktu (7,7%), dan 18 orang PJLP (26,1%). Komposisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BRBIH didukung oleh perpaduan antara ASN dan tenaga non-ASN, sehingga kebutuhan organisasi dapat dipenuhi secara optimal. Ke depan, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi pendidikan, serta penguatan kapasitas seluruh SDM perlu terus dilakukan agar mampu mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara berkelanjutan.

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Cover Laporan
- b. Kata Pengantar

Pada bagian ini berisi tentang pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan, dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BRBIH

c. Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Tahun 2025.

d. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

e. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

f. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

g. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

h. Lampiran

Bab ini berisi perjanjian kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu

F. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

1. Sumber Daya Manusia

Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung pengembangan sektor perikanan, khususnya budidaya ikan hias. SDM di balai ini terdiri dari instruktur, teknisi akuakultur, teknisi lapangan dan tenaga administrasi yang kompeten di bidangnya.

Para instruktur, teknisi akuakultur dan teknisi lapangan di balai riset ini memiliki pengalaman luas dalam teknik budidaya ikan hias, baik secara tradisional maupun menggunakan teknologi modern. Mereka juga berkompeten dalam manajemen pakan, kualitas air, dan pengendalian penyakit, yang menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya ikan hias.

Dengan adanya SDM yang handal, BRBIH turut aktif dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta. Hal ini mendorong terciptanya inovasi dalam peningkatan efisiensi dan keberlanjutan dalam budidaya ikan hias.

Tidak hanya itu, BRBIH juga terus mendukung pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku industri untuk meningkatkan keterampilan dalam budidaya ikan hias melalui program pelatihan dan workshop. Dengan keahlian yang dimiliki, SDM di Balai Riset Budidaya Ikan Hias memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan industri ikan hias Indonesia, menciptakan peluang pasar baru, serta mendukung konservasi spesies ikan hias yang langka dan bernilai ekonomi tinggi.

2. Sumber Daya Ikan

Potensi ikan hias Indonesia tidak hanya bersumber dari air tawar, ikan hias laut juga cukup prospektif untuk dikembangkan, selain dari itu kita sadari bahwa potensi ikan hias akan mengalami eksploitasi yang berlebihan apabila dimanfaatkan secara tidak efisien, tidak dikelola

secara arif dan bijaksana dan akhirnya kekurangan persediaan atau bahkan kehilangan spesies. Sebagai pasar ikan hias terbesar di dunia, adanya regulasi pasar ikan hias di Eropa yang mensyaratkan ekspor beberapa komoditas ikan hias harus dari hasil budidaya dapat menjadi peluang dan tantangan yang sangat dibutuhkan guna menembus pasar tersebut.

Melihat hal tersebut maka BRBIH sebagai satker di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bergerak dalam pengembangan budidaya ikan hias tentu saja berpotensi sangat besar untuk mendukung peningkatan produksi nasional. Saat ini, sumberdaya ikan yang masih dibudidayakan di BRBIH terdiri atas ikan hias air tawar dan masih dibudidayakan, diantaranya Ikan Arwana, Koi, Discus dan Platy disamping budidaya komoditas maggot sebagai pakan alternatif. Ikan hias dari hasil samping kegiatan riset beberapa tahun sebelumnya masih terpelihara sebagai ikan koleksi yang dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung yang datang ke BRBIH.

3. Sarana dan Prasarana

Selain potensi berupa SDM dan Sumber Daya Ikan, BRBIH juga memiliki potensi sarana dan prasarana berupa lahan yang dimiliki seluas 12,5 Ha dengan fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengembangan kelautan dan perikanan. Sejak beralihnya fungsi riset di tahun 2021, telah dilakukan penyesuaian fungsi sarana dan prasarana yang ada dan dikelompokkan ke dalam beberapa cluster, diantaranya cluster loca feed, cluster tanaman hias air dan cluster arwana. Penggunaan lahan untuk fasilitas lainnya masih terus dikembangkan dan dituangkan dalam site plan BRBIH yang disiapkan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru nantinya. Fasilitas-fasilitas yang tersedia saat ini disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2. Fasilitas Balai Riset Budidaya Ikan Hias

NO	FASILITAS	FUNGSI	KEGIATAN
1	Laboratorium Uji	Lab. Genetika	analisa molekuler seperti RAPD, PCR, MHC, Uji KHV
		Lab. Nutrisi	-
		Lab. Kualitas Air	analisa kualitas air dengan berbagai parameter fisika dan kimia seperti Amonia, Nitrit, Nitrat, Suhu, Oksigen Terlarut, pH, Alkalinitas, Kesadahan, TSS, Konduktivitas,
		Lab. Biologi	Budidaya tanaman hias air
		Lab. Pakan Alami	Budidaya pakan alami berupa moina dengan hasil samping cacing beku
2	Hatcheri/ hanggar	Aquatia 1	Budidaya ikan hias platy
		Aquatia 2	Budidaya ikan hias Koi dan Koki
		Aquatia 3	Gedung serba guna
		Aquatia 4	Budidaya discuss dan pemeliharaan ikan koleksi
		Klaster Arwana	Budidaya ikan hias arwana
		Klaster Loca Feed	Budidaya magot dan produksi pakan buatan dengan produk turunan magot
3	Kolam/Bak Pemeliharaan	Kolam Beton	Pemeliharaan Ikan Koi
		Kolam Tanah	Budidaya ikan koi
		Bak Beton	Budidaya ikan platy, pembesaran ikan koki
4	Gedung Penunjang	Gedung Administrasi	Pusat keadministrasian BRBIH
		Gedung Instruktur	Ruang kerja instruktur dan teknisi serta mahasiswa PKL/Magang
		Guest house	Sarana pendukung untuk tamu dan peserta magang, pkl dan penelitian
		Showroom	Sarana untuk menampilkan berbagai jenis ikan hias sebagai sumber edukasi bagi masyarakat
		Musholla	Sarana ibadah umat muslim di lingkungan BRBIH
		Stokist Room	Sarana penyimpanan barang persediaan dan barang operasional perkantoran

Sumber: Data BMN BRBIH 2026

b. Permasalahan

Saat ini masalah dan tantangan yang sedang dihadapi BRBIH dalam pelaksanaan program untuk mendukung pembangunan KP diantaranya adalah beralihnya fungsi riset ke BRIN menyebabkan tugas dan fungsi BRBIH sebagai Balai Riset menjadi tidak relevan lagi untuk saat ini. Belum terbitnya peraturan perundangan perihal Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) akibat peralihan riset mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada.



Bab 2

Perencanaan Kinerja

II. PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagai satuan kerja di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), BRBIH berperan dalam mendukung Rencana Strategis BPPSDMKP. Dalam dokumen Rencana Strategis BPPSDMKP Tahun 2025-2029, BPPSDMKP mempunyai visi *“Terwujudnya SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing untuk mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan.”*

Visi BPPSDMKP ini sejalan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2025-2029 yaitu *“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”* dan visi nasional *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*. Visi BPPSDMKP menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan.

Dalam Renstra BPPSDMKP dijelaskan bahwa mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025, untuk mendukung Misi KKP, BPPSDMKP melaksanakan 1 dari 4 Misi/Asta Cita yang difokuskan KKP dalam mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi KKP *“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”* tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu *“Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”*.

Sebagaimana tercantum juga dalam Renstra BPPSDMKP 2025-2029, Sasaran Strategis (SS) pembangunan kelautan dan perikanan yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP dari sektor SDM ada pada SS-4 “Meningkatnya Kualitas SDM KP” dan SS-5 “Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas”. Untuk mendukung SS-4 dan SS-5 tersebut, BPPSDMKP menjabarkan ke dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Sasaran Program (ISP) yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator, dan Target 2025–2029

Sasaran Strategis (SS)	Sasaran Program (SP)	Indikator Sasaran Program (ISP)	Target 2026	Target 2029
SS-4: Meningkatkan Kualitas SDM KP	SP-1: Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM KP	Persentase lulusan pendidikan/pelatihan KP yang kompeten/ tersertifikasi dan terserap di DUDIKA	76%	79%
		Persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama yang ditingkatkan kelasnya	52%	58%
SS-5: Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	SP-2: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPSDM	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi BPPSDM (Indeks)	86,5	88

Sumber: Renstra BPPSDM KP 2025-2029

Berdasarkan Renstra BPPSDM Tahun 2025-2029, maka pada tahun 2026, BRBIH mendukung SS-5 KKP dengan Sasaran Program SP-2 BPPSDMKP. Dalam mendukung SP-2 tersebut, BRBIH melaksanakan Program yang mengacu kepada Rencana Kerja KKP Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 tanggal 18 Desember 2025.

B. Rencana Kerja Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan mengacu kepada Rencana Kerja KKP dan BPPSDMKP, maka Program yang dilaksanakan di BRBIH dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Program BRBIH Tahun 2026

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU (RP)
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8,579,148,000
Jumlah Anggaran		8,579,148,000

Sumber: DIPA BRBIH Tahun 2026

Seiring berjalannya kegiatan terdapat beberapa perubahan DIPA dengan beberapa penyesuaian dalam dukungan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Revisi DIPA

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Tanggal	1 Desember 2026	-
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	-
	Belanja barang	3.298.990.000	-
	Total	8.870.947.000	
1	Tanggal	1 Desember 2025	31 Desember 2025
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.298.990.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program
	Keterangan	Revisi Anggaran RO Khusus berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1158/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ROK Khusus Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2026	
2	Tanggal	31 Desember 2025	12 Februari 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.303.778.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	2 Program	2 Program
	Keterangan	Revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Triwulan I pada Halaman III DIPA	

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
3	Tanggal	12 Februari 2026	23 April 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.303.778.000	2.879.102.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.446.271.000
	Program	2 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi Efisiensi Anggaran berdasarkan : Surat Plt. Sekretaris Jenderal 504/SJ/RC.420/IV/2026 tanggal 12 April 2026 hal Tindak Lanjut Penghematan Belanja KKP TA 2026	
4	Tanggal	23 April 2026	7 Mei 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	2.879.102.000	2.879.102.000
	Total Anggaran	8.446.271.000	8.446.271.000
	Program	1 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Triwulan II pada Halaman III DIPA	
5	Tanggal	7 Mei 2026	25 Mei 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	2.879.102.000	3.011.979.000
	Total Anggaran	8.446.271.000	8.579.148.000
	Program	1 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi pergeseran anggaran belanja operasional (52) antar satker dalam 1 Kanwil (pergeseran anggaran dari Satker BRPBATPP Bogor) sesuai dengan surat dari PLh Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu Nomor S-224/PB.2/2026 Tanggal 25 Mei 2026 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada awal Tahun Anggaran 2026 ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2025 dengan total pagu anggaran sebesar Rp 8.870.947.000, yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp 5.571.957.000 dan Belanja Barang sebesar Rp3.298.990.000.

Berdasarkan Tabel diatas, DIPA BRBIH Tahun Anggaran 2026 mengalami lima kali revisi sebagai tindak lanjut atas perubahan kebijakan pemerintah, penyesuaian kebutuhan organisasi, serta optimalisasi pelaksanaan anggaran. Revisi tersebut mencakup penyesuaian alokasi anggaran, struktur program, dan rencana penarikan dana yang dilakukan secara bertahap sepanjang tahun anggaran.

Perubahan tersebut meliputi penyesuaian anggaran RO Khusus, penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran sesuai arahan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pergeseran anggaran belanja operasional antar satuan kerja dalam lingkup BPPSDM KP. Selain itu, terdapat penyesuaian struktur program sebagai konsekuensi dari perubahan kebijakan penganggaran yang berlaku.

Secara keseluruhan, revisi DIPA Tahun 2026 mengakibatkan perubahan pagu anggaran BRBIH dari semula Rp8.870.947.000 menjadi Rp8.579.148.000. Meskipun terjadi penyesuaian pagu dan komposisi anggaran, perubahan tersebut tidak mengurangi komitmen BRBIH dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebaliknya, revisi tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan alokasi anggaran tetap selaras dengan prioritas program, kebijakan pemerintah, serta kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, pengelolaan anggaran BRBIH diharapkan semakin efektif, efisien, adaptif, dan akuntabel, sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja secara optimal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2026.

C. Perjanjian Kinerja

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran program dan kegiatan secara optimal dan tepat waktu, pada tahun 2026 disusun Perjanjian Kinerja BRBIH dengan satu sasaran kegiatan (SK) yang harus dicapai sebelum akhir tahun. Untuk mengukur keberhasilan SK, ditetapkan ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan IK BRBIH pada tahun 2026 berjumlah 9 IK, dengan rincian pada PK sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 6. Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2026
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86
		2	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1
		3	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75
		5	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1
		6	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71
		7	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77
		8	Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1
		9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Sumber: Perjanjian Kinerja BRBIH Tahun 2026

Berdasarkan tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tersebut, BRBIH menetapkan target kinerja yang terukur dan komprehensif untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, yang mencakup aspek pengawasan, pengelolaan dan perencanaan anggaran, akuntabilitas kinerja, profesionalitas ASN, pengelolaan kearsipan, transparansi pengadaan, inovasi pelayanan publik, serta keterbukaan informasi. Penetapan indikator dan target tersebut diharapkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berorientasi pada hasil guna mencapai kinerja organisasi secara optimal pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mengalami 1 (satu) kali revisi sebagai tindak lanjut terhadap perubahan dokumen perencanaan kinerja di lingkungan BPPSDM KP. Revisi tersebut tidak mengubah sasaran kegiatan maupun indikator kinerja yang telah ditetapkan,

namun lebih bersifat administratif, yaitu penyesuaian pagu anggaran dan perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja. Rincian perubahan tersebut disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 7. Rincian Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

NO	POIN PERUBAHAN	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
REVISI I			
1.	Tanggal penandatanganan Perjanjian Kinerja	7 Januari 2026	29 Juni 2026
2.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 2	Joni Haryadi D	Lilly Aprilya Pregiwati
4.	Jabatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 2	Plt. Sekretaris BPPSDM KP	Sekretaris BPPSDM KP
5.	Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3	Joni Haryadi D	Gleni Hasan Huwoyon
6.	Jabatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Level 3	Kepala BRBIH	Plt. Kepala BRBIH
7.	Pagu anggaran	8.870.947.000	8.579.148.000
8.	Narasi IK 9	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)
9.	Dasar perubahan PK	Nota Dinas dari Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor: 3961/BPPSDM/RC.610/XII/2025 Tanggal: 1 Desember 2025 Hal: Tindak Lanjut Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja BPPSDM KP Tahun 2025	

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dilakukan sebagai tindak lanjut atas penyesuaian dokumen perencanaan kinerja di lingkungan BPPSDM KP sesuai dengan Nota Dinas Plt. Sekretaris BPPSDM Nomor 3961/BPPSDM/RC.610/XII/2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Tindak Lanjut Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Kinerja BPPSDM KP. Penyesuaian tersebut bersifat administratif sebagai konsekuensi adanya perubahan pejabat penandatanganan Perjanjian Kinerja dan penyesuaian waktu penandatanganan dokumen.

Secara substansi, revisi tersebut tidak mengubah sasaran kegiatan, indikator kinerja, maupun target kinerja BRBIH Tahun 2026. Perubahan yang

dilakukan bertujuan untuk menyelaraskan dokumen Perjanjian Kinerja dengan perkembangan organisasi, perubahan alokasi anggaran, serta penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, sehingga tetap menjadi dasar yang valid dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja BRBIH Tahun 2026.

D. Pengukuran Kinerja

Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BRBIH Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, sehingga diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

- Angka maksimum adalah 120;
- Angka minimum adalah 0;
- Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- Adapun status Indeks capaian IKM adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Gambar 4. Status Indeks capaian IKK

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Metode pengukuran kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup BRBIH dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkup BRBIH yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: 17/BRBIH/RC.610/I/2026 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Sekretariat BPPSDMKP.



Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan instrumen fundamental bagi Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan terhadap sasaran yang telah ditetapkan. Proses evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa visi dan misi organisasi selaras dengan realisasi di lapangan, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas terhadap sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi dan penetapan kinerja tahun 2026.

Seluruh pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja (IK) BRBIH mengacu pada kerangka kerja logis (*Logical Framework Analysis*) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi melalui sistem aplikasi Kinerjaku (<http://kinerjaku.kkp.go.id>). Integrasi data ini menjamin bahwa setiap hasil pengukuran bersifat transparan dan objektif.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan II tahun 2026, BRBIH berhasil mencatatkan kinerja korporat yang sangat positif dengan rata-rata capaian sebesar 114,82%. Dari total indikator yang dikelola, sebaran status capaian pada *dashboard* Kinerjaku adalah sebagai berikut:

- 3 Indikator Kinerja berstatus Biru: Menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan melampaui target yang ditetapkan secara signifikan.
- 1 Indikator Kinerja berstatus Hijau: Menunjukkan capaian yang berhasil memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Hasil ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran BRBIH dalam menjaga kualitas performa organisasi tetap berada pada level optimal. Rincian sebaran status capaian tersebut disajikan pada tampilan *dashboard* kinerjaku berikut ini:



Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Gambar 5. Dashboard Kinerjaku BRBIH Tahun 2026

2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) dilakukan secara sistematis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar dalam pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa BRBIH memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 114,82. Nilai tersebut merupakan akumulasi capaian indikator kinerja yang telah dapat diukur pada periode pelaporan, sedangkan beberapa indikator lainnya masih dalam proses pelaksanaan dan akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun sesuai periode pengukurannya. Rincian target dan capaian masing-masing indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 8. Capaian Kinerja Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	CAPAIAN TRIWULAN II 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026						114,82
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1	83	100	120
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1	76	90,66	119,29
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan Tabel diatas, sebagian indikator kinerja telah menunjukkan perkembangan yang positif dan bahkan melampaui target triwulan, sementara indikator lainnya belum dapat diukur karena memiliki periode pengukuran tahunan. Selanjutnya, masing-masing indikator kinerja akan dianalisis secara lebih rinci, meliputi perkembangan capaian, faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja pada akhir Tahun 2026.

Sasaran Kegiatan 1

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Jenderal. Pengukuran dilakukan secara triwulanan dengan menghitung perbandingan antara jumlah rekomendasi yang telah berstatus tuntas terhadap total rekomendasi yang diberikan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 hingga Triwulan III Tahun 2026. Indikator ini bersifat maximize, dimana capaian yang semakin tinggi menunjukkan semakin baiknya komitmen unit dalam memperbaiki tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026 BRBIH tidak termasuk menjadi satker yang terdapat di lampiran, sehingga capaian BRBIH adalah 86% sesuai target triwulan II 2026 sebagaimana data berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator 1

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.01 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)									
Realisasi Triwulan II Tahun 2022-2025				Triwulan II Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Triwulan II Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
	75	100	85	86	86	100,00	1,18	89	96,63

Sumber : Data Primer BRBIH 2026

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BRBIH merupakan indikator yang mengukur tingkat pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan sebagai

dasar perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja organisasi. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara efektif sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi BRBIH.

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan II Tahun 2026 indikator ini ditargetkan sebesar 86% dan berhasil direalisasikan sebesar 86%, sehingga tingkat capaiannya mencapai 100%. Dibandingkan dengan realisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar 85%, terjadi peningkatan sebesar 1,18%. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 89%, capaian Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 96,63% dari target yang ditetapkan.

Secara historis, realisasi indikator ini menunjukkan tren yang relatif baik. Pada Triwulan II Tahun 2023 realisasi mencapai 75%, meningkat menjadi 100% pada Triwulan II Tahun 2024, kemudian berada pada 85% pada Triwulan II Tahun 2025, dan kembali meningkat menjadi 86% pada Triwulan II Tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa BRBIH mampu mempertahankan konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut rekomendasi, koordinasi yang intensif antarunit, serta pemantauan melalui aplikasi SIDAK dan rapat evaluasi rutin turut memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat diselesaikan secara efektif. Dukungan program Layanan Perkantoran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi juga berkontribusi dalam penyediaan dokumen, koordinasi, serta pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak hanya dipenuhi sebagai bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan proses bisnis, penguatan pengendalian internal, dan peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Dengan demikian, indikator ini memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan di lingkungan BRBIH.

Program utama yang menjadi pilar keberhasilan capaian indikator ini adalah Layanan Perkantoran. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan pengendalian internal yang intensif dan berkelanjutan, dengan keterlibatan langsung Kepala Satuan Kerja bersama para penanggung jawab kegiatan melalui evaluasi rutin mingguan. Untuk memastikan pengawasan menjangkau hingga level operasional, dilaksanakan briefing pagi dan sore setiap hari pada masing-masing klaster yang difokuskan pada identifikasi serta mitigasi risiko secara real-time, dengan dukungan komitmen pimpinan dalam menjaga integritas dan kepatuhan pada seluruh lini.

Upaya menjaga dan meningkatkan capaian kinerja juga diperkuat melalui pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pada aplikasi SIDAK, penyusunan Surat Keputusan Satuan Tugas SPIP BRBIH, penerapan manajemen risiko yang mencakup identifikasi, pengendalian, dan pemantauan risiko satuan kerja, serta penyusunan laporan SPIP secara rutin setiap bulan. Selain itu, pengawalan pencapaian indikator dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi SPIP bulanan sebagai forum evaluasi untuk mengantisipasi potensi kendala administratif maupun operasional, yang didukung oleh pemantauan berkala melalui aplikasi SIDAK guna memastikan seluruh arahan dari Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti secara optimal.

Indikator Kinerja 2

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRBIH merupakan ukuran yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari aspek perencanaan, pelaksanaan, serta capaian output kegiatan. Pengukuran dilakukan berdasarkan komponen penilaian yang telah ditetapkan dan bersifat *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai IKPA menunjukkan semakin baik kualitas tata kelola pelaksanaan anggaran.

IKPA tidak hanya mengukur tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga menilai ketepatan revisi DIPA, akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD), kualitas belanja kontraktual, ketepatan penyelesaian tagihan, pengelolaan UP/TUP, serta capaian output kegiatan. Dengan demikian, nilai IKPA mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan BRBIH dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Periode pengukuran IKPA dilaksanakan secara semesteran, dengan nilai yang digunakan dalam pelaporan kinerja merupakan nilai posisi akhir pada semester berjalan. Semester I mencakup periode Januari sampai dengan Juni, sedangkan Semester II merupakan nilai kumulatif Januari sampai dengan Desember (nilai akhir tahun). Meskipun monitoring dilakukan secara berkala melalui aplikasi myintress, nilai yang digunakan dalam laporan kinerja adalah nilai pada akhir periode semester.

Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan menggunakan 3 indikator penilaian yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan rincian variabel sebagai berikut :

Tabel 10. Bobot Nilai IKPA 2026

No	Indikator	Bobot
Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran		
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (halaman III DIPA)	15
Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
3	Penyerapan anggran	20
4	Belanja kontraktual	10
5	Penyelesaian tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	Pengurang Nilai IKPA
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		
8	Capaian output	25

Sumber: Per-5/PB/2024

Mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi My Intress yang dapat diakses pada <https://myintress.kemenkeu.go.id/> dengan kategori nilai IKPA sebagai berikut:

Tabel 11. Kategori Nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	≥ 95	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{Nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{Nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	< 70	Kurang

Sumber: Per-5/PB/2024

Periode pengukuran IKPA dilakukan secara semesteran, yaitu Semester I yang mencakup periode Januari–Juni dan Semester II yang merupakan nilai kumulatif Januari–Desember (nilai akhir tahun). Oleh karena itu, nilai IKPA yang digunakan dalam Laporan Kinerja Triwulan II merupakan nilai resmi Semester I Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Nomor 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 Perihal Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 2

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.02 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)									
Realisasi Triwulan II Tahun 2022-2025				Triwulan II Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Triwulan II Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
88,52	94,37	99,65	100,00	83	100	120,48	0,00	92,20	108,46

Berdasarkan hasil pengukuran Semester I atau Triwulan II Tahun 2026, BRBIH memperoleh Nilai IKPA sebesar 100, melampaui target Triwulan II yang ditetapkan sebesar 83, sehingga tingkat capaian indikator mencapai 120,48% atau 120% pada aplikasi kinerjaku. Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025, nilai IKPA tetap berada pada angka maksimal yang dapat diperoleh yaitu 100, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran berhasil dipertahankan secara konsisten. Selain itu, capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 92,20, dengan tingkat pencapaian mencapai 108,46%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program/Kegiatan Layanan Manajemen Keuangan yang berjalan secara efektif, khususnya melalui pengelolaan anggaran yang tertib dan sesuai ketentuan. Berbagai upaya telah dilakukan, antara lain penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) melalui revisi Halaman III DIPA, pengendalian revisi anggaran sesuai kebutuhan, percepatan penyelesaian tagihan, optimalisasi pengelolaan UP/TUP, pemantauan realisasi anggaran secara berkala, serta penginputan capaian output tepat waktu. Selain itu, koordinasi yang intensif dari internal pengelola keuangan maupun eksternal dengan pengelola teknis kegiatan, turut mendukung terjaganya kualitas pelaksanaan anggaran pada seluruh komponen penilaian IKPA.

Pencapaian nilai IKPA sebesar 100 menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran BRBIH pada Semester I Tahun 2026 telah berjalan sangat baik, dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil pelaksanaan anggaran. Kondisi ini menjadi modal yang kuat bagi BRBIH untuk mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran hingga akhir Tahun 2026 serta mendukung pencapaian sasaran organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sejalan dengan upaya tersebut, langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk menjaga nilai IKPA ke depan antara lain meliputi:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran per semester dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L.
2. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
3. Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai.
4. Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker.
5. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
6. Melakukan penginputan capaian output tepat waktu.

Indikator Kinerja 3

Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)

Indikator ini mengukur kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja yang diselenggarakan oleh BRBIH. Nilai Akuntabilitas Kinerja menggambarkan sudah sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran yang dilaksanakannya. Nilai tersebut diperoleh melalui Evaluasi Implementasi SAKIP yang dilakukan berdasarkan

Permen-PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai PM SAKIP BRBIH pada tahun 2026 adalah 81,5 dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH merupakan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja di lingkungan BRBIH, yang mencerminkan sejauh mana proses perencanaan hingga evaluasi telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi hasil.

Pengukuran indikator ini menggunakan nilai posisi akhir tahunan dengan polarisasi *maximize*, sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kualitas implementasi akuntabilitas kinerja. Hasil penilaian selanjutnya dikategorikan dalam predikat mulai dari Sangat Kurang hingga Sangat Memuaskan, yang menjadi dasar dalam menilai tingkat efektivitas tata kelola kinerja instansi. Sumber data berasal dari hasil penilaian internal satuan kerja yang kemudian diverifikasi oleh Tim SAKIP BPPSDM serta dapat didukung oleh hasil uji petik Inspektorat Jenderal.

Program/Kegiatan yang mendukung IKM ini adalah Layanan Pemantauan dan evaluasi berupa pengelolaan dokumen kinerja mencakup Penyusunan dokumen perencanaan kinerja, Verifikasi dan validasi pengukuran kinerja, Penyusunan Laporan kinerja, Evaluasi Rencana Aksi, Penilaian Mandiri SAKIP.

Indikator Kinerja 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan secara tahunan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot dan kategori pada masing-masing indikator sebagaimana berikut:

Tabel 13. Bobot Variabel Penilai Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)

No	Variabel	Uraian	Bobot
1	Efektivitas (75)	Capaian RO	75
2	Efisiensi (25)	Penggunaan SBK	10
		Efisiensi SBK	15

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Tabel 14. Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

No	Kategori	Nilai KPA
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	> 80-90
3	Cukup	> 60-80
4	Kurang	< 50

Sumber : PMK 62 Tahun 2023

Indikator ini baru akan dilakukan pengukuran pada Triwulan IV Tahun 2026 dengan target yang harus dicapai sebesar 71,75. Sementara itu sejak Triwulan I 2026 rangkaian kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan, dimulai dari melaporkan capaian RO setiap bulannya hingga perencanaan anggaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2026.

Dalam upaya mencapai target, Indikator Kinerja ini didukung oleh program/kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran meliputi

kegiatan penyusunan KAK, RAB, RKAKL dan DIPA serta revisi DIPA/RKAKL tahun berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator Kinerja 5

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)

Indeks Profesionalitas ASN BRBIH merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian antara kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pengukuran indeks ini bertujuan untuk menilai kualitas ASN dalam menjalankan perannya secara efektif sesuai dengan tuntutan jabatan yang diemban.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara semesteran dengan menggunakan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi diukur berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki ASN. Dimensi kompetensi diperoleh dari hasil konversi predikat kinerja tahun sebelumnya serta riwayat pengembangan kompetensi melalui pelatihan baik klasikal maupun non-klasikal selama tahun berjalan. Dimensi kinerja mengacu pada capaian hasil kerja ASN, sedangkan dimensi disiplin mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan kepegawaian.

Sesuai dengan surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 terdapat penyesuaian formula perhitungan untuk IP ASN BKN, berdasarkan surat tersebut penilaian IP ASN KKP pun ikut menyesuaikan. Pada dimensi kompetensi mengalami penyesuaian sebagai berikut:

JABATAN	JENIS JABATAN	INSTRUMEN													
		BOBOT DASAR					DIKLAT KEPEMIMPINAN		DIKLAT FUNGSIONAL		DIKLAT TEKNIS		PENGEMBANGAN KOMPETENSI		
		HASIL PENILAIAN KINERJA					Sudah	Belum	Sudah	Belum	Sudah	Belum	>=20 JP	< 20JP	
Sangat Baik	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang/ Misconduct	Sangat Kurang											
Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Administrator	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pengawas	25	20	15	10	5	10	0	-	-	-	-	5	proporsional	
Non Manajerial	Jabatan Fungsional	25	20	15	10	5	-	-	10	0	-	-	5	proporsional	
	Jabatan Pelaksana	25	20	15	10	5	-	-	-	-	10	0	5	proporsional	

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 6. Reformulasi Dimensi Kompetensi Tahun 2026

Sedangkan pada indikator Kualifikasi tahun 2025 mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	25	20	10	10	10
Jabatan Administrator	25	25	20	10	10	5
Jabatan Pegawai	25	25	25	20	10	10
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	25	25	25	20	10
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	25	20	10	10	10
Jabatan Pelaksana	25	25	25	25	20	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 7. Reformulasi Dimensi Kualifikasi Tahun 2025

Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja sebagai berikut:

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

Sumber : surat BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024

Gambar 8. Kategori Dimensi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDMAO KKP dengan mengacu pada Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang

Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Adapun penilaian IP ASN tersebut meliputi 4 (empat) dimensi yaitu Kualifikasi (25%), Kompetensi (40%), Kinerja (30%) dan Disiplin (5%) dengan pengkategorian sebagai berikut:

Kategori	Nilai
Sangat Tinggi	91 - 100
Tinggi	81 - 90
Sejang	71 - 80
Rendah	61 - 70
Sangat Rendah	0 - 60

Sumber : Peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019

Gambar 9. Kategori Nilai IP ASN

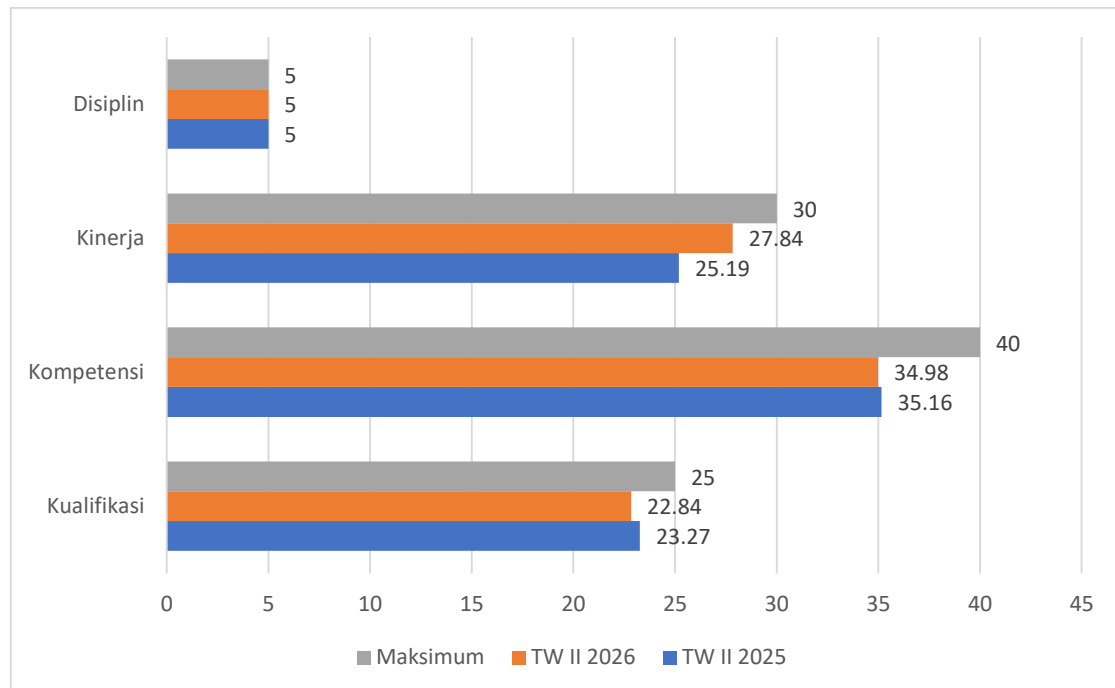
Mengacu pada mekanisme pengukuran yang telah ditetapkan, nilai Indeks Profesionalitas ASN BRBIH Semester I Tahun 2026 ditetapkan melalui Nota Dinas Sekretaris BPPSDM Nomor 2816/BPPSDM.1/KP.720/VII/2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026 Lingkup BPPSDM. Adapun hasil pengukuran tersebut ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 15. Capaian Kinerja IK 5

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.05 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)									
Realisasi Triwulan II Tahun 2022-2025				Triwulan II Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Triwulan II Tahun 2024-2025	Target 2029	% Capaian thd target 2029
73,79	82,14	88,14	88,62	76	90,66	119,29	2,30	85	106,66

Berdasarkan hasil pengukuran Triwulan II Tahun 2026, BRBIH memperoleh Indeks Profesionalitas ASN sebesar 90,66, melampaui target Triwulan II sebesar 76,00, sehingga tingkat capaian mencapai 119,29%. Dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 88,62, terjadi peningkatan sebesar 2,30%. Selain itu, capaian tersebut telah melampaui target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 85,00, dengan tingkat pencapaian sebesar 106,66%.

Adapun rincian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 10. Rincian Perbandingan Hasil Penilaian IP ASN BRBIH Triwulan II Tahun 2026 dengan Triwulan II Tahun 2025 dan Nilai Maksimum berdasarkan Dimensi Penilaian

Berdasarkan grafik perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN, nilai IP ASN BRBIH meningkat dari 88,62 pada Triwulan II Tahun 2025 menjadi 90,66 pada Triwulan II Tahun 2026 atau meningkat sebesar 2,30 poin. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan pada dimensi kinerja, sementara dimensi lainnya relatif stabil, sebagaimana penjelasan berikut:

1. **dimensi kualifikasi**, nilai mengalami penurunan dari 23,27 menjadi 22,84 atau turun 0,43 poin. Penurunan ini terjadi karena pengukuran kualifikasi tidak hanya mempertimbangkan jenjang pendidikan terakhir, tetapi juga kesesuaian tingkat pendidikan dengan persyaratan minimal jabatan sebagaimana diatur dalam reformulasi pengukuran IP ASN oleh BKN. Dengan demikian, apabila terdapat perubahan komposisi pegawai, mutasi jabatan, atau masih terdapat pegawai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang didudukinya,

maka nilai dimensi kualifikasi dapat mengalami penurunan meskipun tidak terjadi penurunan tingkat pendidikan pegawai.

2. **dimensi kompetensi**, terjadi penurunan nilai dari 35,16 menjadi 34,98 atau sebesar 0,18 poin. Berdasarkan ketentuan pengukuran terbaru, dimensi kompetensi dipengaruhi oleh akumulasi pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan nonklasikal serta konversi predikat kinerja tahun sebelumnya. Penurunan tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan Jam Pelajaran (JP) pengembangan kompetensi oleh sebagian pegawai atau pembaruan data pelatihan pada periode penilaian belum optimal sehingga sedikit memengaruhi nilai kompetensi.
3. **dimensi kinerja**, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 25,19 menjadi 27,84 atau naik 2,65 poin. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya capaian kinerja individu ASN berdasarkan hasil evaluasi kinerja pegawai yang menjadi salah satu komponen utama dalam penghitungan IP ASN. Meningkatnya predikat kinerja pegawai memberikan kontribusi terbesar terhadap kenaikan nilai Indeks Profesionalitas ASN BRBIH pada Triwulan II Tahun 2026.
4. **dimensi disiplin**, tetap berada pada nilai maksimum 5,00, yang menunjukkan bahwa selama periode penilaian tidak terdapat pelanggaran disiplin yang memengaruhi pengurangan nilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN.

Secara keseluruhan, peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN BRBIH pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kinerja ASN mampu mengimbangi penurunan yang relatif kecil pada dimensi kualifikasi dan kompetensi. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan serta pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui berbagai kegiatan pelatihan. Upaya tersebut

diharapkan dapat meningkatkan nilai pada setiap dimensi Indeks Profesionalitas ASN secara lebih optimal pada periode penilaian berikutnya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini juga didukung oleh pengelolaan administrasi kepegawaian yang semakin baik, antara lain melalui penyebaran informasi pelatihan kepada seluruh pegawai, pemantauan perkembangan nilai Indeks Profesionalitas ASN melalui aplikasi kepegawaian, serta pembaruan data kepegawaian secara berkala. Langkah-langkah tersebut memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pegawai untuk meningkatkan kompetensi, memenuhi persyaratan administrasi kepegawaian, dan mendukung peningkatan nilai profesionalitas ASN.

Program/kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator ini adalah Layanan Manajemen SDM, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya manusia secara terencana dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut meliputi mendorong seluruh pegawai untuk mengikuti seminar, bimbingan teknis, maupun pendidikan dan pelatihan dengan akumulasi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) sebagai upaya peningkatan dimensi kompetensi; memfasilitasi pegawai yang sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar agar segera menyelesaikan pendidikannya dan memproses pencantuman gelar guna meningkatkan nilai pada dimensi kualifikasi; mendorong pejabat fungsional tertentu untuk meningkatkan jenjang pendidikan sesuai persyaratan jabatan; serta memperkuat budaya disiplin melalui pengawasan melekat oleh atasan langsung dan sosialisasi ketentuan disiplin ASN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

Dengan berbagai upaya tersebut, BRBIH terus berkomitmen meningkatkan profesionalitas ASN secara berkelanjutan melalui pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, penguatan budaya kinerja, dan penegakan disiplin. Komitmen ini diharapkan tidak hanya mampu mempertahankan capaian Indeks Profesionalitas ASN yang telah melampaui

target, tetapi juga menjadi fondasi dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berdaya saing sehingga mampu mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Indikator Kinerja 6

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan BRBIH, khususnya dalam pengelolaan arsip dinamis yang mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip telah sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran indikator ini mengacu pada aspek pengelolaan arsip dinamis dan dukungan sumber daya kearsipan, yang meliputi kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana kearsipan. Penilaian dilakukan menggunakan instrumen Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari ANRI yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan dan kematangan pengelolaan arsip di unit kerja.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal dilakukan pengukuran pada akhir tahun berdasarkan nilai posisi akhir dengan polarisasi maximize, sehingga semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kualitas pengelolaan arsip. Pengukuran dilakukan secara tahunan dengan sumber data berasal dari Biro Umum, serta didukung oleh dokumen hasil pengawasan dan evaluasi kearsipan internal.

Secara umum, indikator ini mencerminkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan tata kelola arsip yang tertib, sistematis, dan akuntabel sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengelolaan arsip yang optimal juga menjadi elemen penting dalam mendukung transparansi,

akuntabilitas, serta ketersediaan informasi yang andal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan yang mendukung untuk mencapai target di akhir tahun, indikator kinerja ini di dukung oleh Program/Kegiatan Layanan umum meliputi kegiatan berupa pengalihan media arsip, pemilahan arsip aktif dan in aktif, penilaian pengawasan kearsipan, penyampaian draft arsip aktif, pemilahan arsip usul musnah, pengusulan penghapusan aset kondisi rusak berat serta evaluasi sop kerarsipan agar memastikan seluruh rangkaian kegiatan kearsipan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator Kinerja 7

Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Dalam pelaksanaannya, capaian indikator dihitung dengan membagi nilai RUP di SiRUP dengan pagu pengadaan, lalu dikalikan 100%. Namun, terdapat ketentuan khusus di mana jika unit kerja mengumumkan RUP melebihi pagu pengadaan (lebih dari 100%), maka selisih kelebihan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator. Data ini dikelola oleh Biro Umum dan PBJ dengan tingkat validitas Output Kendali Rendah dan menggunakan jenis perhitungan Nilai Posisi Akhir.

Pengukuran dilakukan secara triwulanan, di mana penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya dengan bukti dukung

berupa Surat atau Nota Dinas dari Biro Umum dan PBJ. Karena memiliki polarisasi *maximize*, semakin tinggi persentase pengumuman yang akurat, maka semakin baik pula kualitas perencanaan PBJ di lingkungan tersebut.

Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Capaian BRBIH berdasarkan Nota Dinas Nomor 27988/BPPSDM.1/PL.410/VII/2026 Tanggal 13 Juli 2026 Perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indikator Kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Triwulan II 2026 dapat dilihat data berikut:

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja 7

SK.01 – Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.07 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)									
Realisasi Triwulan II Tahun 2022-2025				Triwulan II Tahun 2026				Target Jangka Menengah	
2022	2023	2024	2025	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan Tahun 2025-2026	Target 2029	% Capaian thd target 2029
			100	77	100	129,87	-	84	119,06

Sumber : Data Primer BRBIH 2026

Berdasarkan tabel di atas, pada Triwulan II Tahun 2026 indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH ditargetkan sebesar 77% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 129,87% atau dibatasi menjadi 120% pada aplikasi Kinerjaku sesuai ketentuan batas maksimum penilaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh paket pengadaan yang menjadi target pada periode pelaporan telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 yang juga telah mencapai 100%, tidak terdapat peningkatan nilai realisasi karena

indikator telah mencapai tingkat optimal pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, tidak terdapat persentase kenaikan capaian dari tahun sebelumnya, namun BRBIH berhasil mempertahankan konsistensi kinerja pada level maksimal. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2029 sebesar 84%, realisasi Triwulan II Tahun 2026 telah mencapai 119,06%, yang menunjukkan bahwa target jangka menengah telah terlampaui.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh komitmen BRBIH dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa melalui pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SIRUP. Faktor pendukung lainnya meliputi koordinasi yang baik antara pengelola perencanaan, pejabat pengadaan, dan pejabat pembuat komitmen, sehingga proses penyusunan dan penginputan RUP dapat dilakukan secara tepat waktu dan selaras dengan dokumen perencanaan serta alokasi anggaran yang tersedia. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan SIRUP turut memastikan bahwa setiap perubahan perencanaan dapat segera ditindaklanjuti melalui pembaruan data pada sistem.

Meskipun capaian indikator telah mencapai tingkat optimal, BRBIH tetap perlu mengantisipasi potensi risiko yang dapat memengaruhi keberlanjutan kinerja, antara lain adanya perubahan kebijakan, revisi anggaran, atau penyesuaian kegiatan yang berpotensi menyebabkan keterlambatan pembaruan data pada aplikasi SIRUP. Oleh karena itu, penguatan pengendalian internal, peningkatan koordinasi antarunit, serta pemantauan secara berkala terhadap kesesuaian antara dokumen perencanaan dan data pada aplikasi SIRUP perlu terus dilakukan agar kualitas pengelolaan pengadaan tetap terjaga.

Pencapaian indikator ini didukung oleh program/kegiatan Layanan Umum, khususnya melalui kegiatan perencanaan pengadaan, penyusunan

dan penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP), pemutakhiran data pada aplikasi SIRUP, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Rangkaian kegiatan tersebut memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terjaganya konsistensi capaian indikator ini, BRBIH menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan efektif. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja 8

Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)

Indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai upaya pengembangan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik dimaknai sebagai terobosan atau gagasan kreatif, baik berupa ide baru maupun pengembangan dari inovasi yang telah ada, yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Penyusunan proposal inovasi mengacu pada ketentuan Kementerian PANRB terkait pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dimana setiap unit kerja didorong untuk menghasilkan inovasi yang relevan, aplikatif, dan berkelanjutan. Proposal yang disusun kemudian diajukan kepada tim penilai eselon I untuk dilakukan evaluasi dan penilaian.

Pengukuran indikator ini didasarkan pada jumlah proposal inovasi yang berhasil disusun dan diajukan dalam satu tahun anggaran. Penilaian menggunakan nilai posisi akhir tahunan dengan polarisasi maximize, sehingga semakin banyak proposal inovasi yang diajukan menunjukkan semakin baik kinerja unit dalam mendorong budaya inovasi. Sumber data indikator ini

berasal dari berita acara penilaian oleh tim penilai eselon I, dengan bukti dukung berupa dokumen proposal inovasi dan surat penyampaian. Pengukuran dilakukan secara langsung (direct) dan dilaporkan setiap tahun sebagai bagian dari evaluasi kinerja organisasi.

Secara umum, indikator ini mencerminkan komitmen BRBIH dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui inovasi yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH pada Tahun 2026 menunjukkan progres yang baik dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan. Meskipun pengukuran indikator ini dilakukan pada akhir tahun, langkah awal telah dilaksanakan dengan penyampaian usulan proposal inovasi pelayanan publik melalui Nota Dinas Kepala BRBIH kepada Sekretaris BPPSDM KP Nomor 45/BRBIH/HP.430/I/2026 hal Penyampaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2026 tanggal 29 Januari 2026 dan perubahan usulan proposal inovasi pelayanan publik pada nota dinas nomor 82/BRBIH/HPM.410/III/2026 tanggal 12 Maret 2026.

Proposal yang diajukan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas sesuai target, tetapi juga menunjukkan kualitas inovasi yang relevan dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Hal ini tercermin dari inovasi yang diusulkan, yaitu O'Fish Dokter (kit pendeteksi karotenoid pakan ikan hias) serta Tamuin (Smart Visitor Intelligence System/ Buku Tamu Digital) yang mendukung transformasi layanan berbasis teknologi informasi. Inovasi tersebut menggambarkan upaya BRBIH dalam menghadirkan solusi yang adaptif, berkelanjutan, dan berdampak.

Progres yang baik ini didukung oleh komitmen pimpinan dalam mendorong budaya inovasi, kesiapan unit kerja dalam menyusun proposal sesuai pedoman Kementerian PANRB, serta respons cepat terhadap permintaan penyampaian usulan inovasi pada awal tahun. Penyampaian

proposal sejak Januari menunjukkan adanya perencanaan yang matang dan kesiapan organisasi dalam mendukung pelaksanaan indikator.

Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam meningkatkan jumlah dan kualitas inovasi yang dihasilkan, serta memastikan bahwa inovasi yang diajukan memiliki keberlanjutan dan potensi replikasi yang lebih luas. Selain itu, penguatan dokumentasi dan integrasi inovasi dengan program prioritas perlu terus dilakukan agar memberikan dampak yang lebih optimal. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan indikator ini menunjukkan arah yang positif dan diharapkan mampu mendukung pencapaian target pada akhir tahun, sekaligus mencerminkan komitmen BRBIH dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

Sejalan dengan upaya tersebut, Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi merupakan program/kegiatan yang berperan penting dalam mendukung pencapaian indikator Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH. Melalui kegiatan ini, BRBIH melaksanakan pengusulan proposal inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, mulai dari identifikasi ide inovasi, penyusunan proposal sesuai pedoman yang berlaku, hingga penyampaian usulan kepada unit pembina di tingkat eselon I. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat peran kehumasan dalam mengomunikasikan inovasi yang dihasilkan serta memastikan bahwa inovasi tersebut memiliki nilai manfaat, keberlanjutan, dan potensi pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, pelaksanaan program ini tidak hanya mendukung pencapaian indikator kinerja, tetapi juga memperkuat budaya inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan BRBIH secara berkelanjutan.

Indikator Kinerja 9

Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)

Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keinformatifan organisasi dalam menyediakan akses informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan prinsip yang mendorong pemerintah untuk memberikan akses yang terbuka dan transparan terhadap informasi publik, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengukuran indikator ini dilakukan secara tahunan dengan polarisasi maximize, sehingga hasil penilaian baru dapat diketahui pada akhir tahun anggaran.

Dalam pengukurannya, unit kerja harus memenuhi kriteria nilai tertentu, antara lain total nilai pengungkit dan hasil minimal 75, nilai pengungkit minimal 40, serta bobot nilai per area pengungkit minimal 60%. Selain itu, komponen pemerintahan yang bersih dan akuntabel harus mencapai minimal 18,25 dan komponen pelayanan publik yang prima minimal 14. Penilaian dilakukan berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Self Assessment Questionnaire (SAQ) oleh Tim Penilai Internal BPPSDM KP. Indikator ini menggunakan satuan nilai dengan validitas output kendali rendah, dan didukung oleh bukti berupa Surat Keputusan PPID KKP.

Meskipun hasil pengukuran akhir belum dapat disajikan, berbagai upaya telah dilakukan sejak awal tahun sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian indikator ini. Dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang terstruktur, BRBIH melalui program Layanan Hubungan Masyarakat secara konsisten melaksanakan kegiatan penyediaan dan pengumuman informasi publik. Informasi yang disampaikan meliputi profil unit organisasi, program dan kegiatan, informasi keuangan, serta informasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan, pengelolaan, dan publikasi informasi melalui media elektronik maupun non-elektronik untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi masyarakat.

BRBIH juga telah menyusun dan mengumumkan Daftar Informasi Publik (DIP) serta Daftar Informasi yang dikecualikan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi publik, yang dapat diakses melalui website PPID. Seluruh upaya tersebut menunjukkan komitmen BRBIH dalam mewujudkan transparansi informasi publik secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH pada akhir tahun, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta kemampuan satuan kerja dalam mengelola sumber daya secara efisien dan akuntabel. Pada Tahun 2026, Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) mengelola pagu anggaran sebesar Rp8.579.148.000 yang seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM). Hingga akhir Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp4.458.772.984 atau sebesar 51,97% dari total pagu. Secara rinci, realisasi anggaran menurut jenis belanja disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 17. Pagu dan realisasi anggaran Tahun 2026

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	5.567.169.000	3.008.016.070	54,03
Belanja Barang	3.011.979.000	1.450.756.914	48,17
Total	8.579.148.000	4.458.772.984	51,97

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp3.008.016.070 atau 54,03% dari pagu sebesar Rp5.567.169.000. Tingkat penyerapan tersebut menunjukkan bahwa belanja pegawai berjalan sesuai kebutuhan operasional rutin dan pembayaran hak pegawai. Sementara itu, Belanja Barang terealisasi sebesar Rp1.450.756.914 atau 48,17% dari pagu sebesar Rp3.011.979.000. Realisasi tersebut mencerminkan bahwa sebagian

besar kegiatan operasional dan pendukung kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pada Triwulan II.

Secara keseluruhan, tingkat penyerapan anggaran sebesar 51,97% hingga Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Diharapkan pada semester kedua penyerapan anggaran dapat terus dioptimalkan melalui percepatan penyelesaian kegiatan, pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala, serta pemantauan terhadap realisasi setiap rencana operasional kegiatan sehingga target penyerapan anggaran pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Seluruh pagu anggaran BRBIH Tahun 2026 sebesar **Rp8.579.148.000** dialokasikan untuk mendukung pencapaian **1 (satu) Sasaran Kegiatan** yang dijabarkan ke dalam **9 (sembilan) Indikator Kinerja**. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja organisasi sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Rincian pagu dan realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 18. Pagu dan realisasi anggaran per sasaran kegiatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	8.571.115.000	4.454.762.466	51,97
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	1.335.000	841.550	63,04
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	1.300.000	599.300	46,10
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	600.000	350.000	58,33

NO	KEGIATAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA MANDATORY	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	1.208.000	600.000	49,67
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	1.590.000	442.520	27,83
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	400.000	400.000	100,00
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	400.000	100.000	25,00
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	1.200.000	677.148	56,43
Total			8.579.148.000	4.458.772.984	51,97

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi anggaran pada masing-masing indikator kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan BRBIH hingga Triwulan II Tahun 2026 berjalan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan. Perbedaan tingkat penyerapan anggaran antar indikator dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kegiatan, jadwal pelaksanaan, serta periode pengukuran indikator kinerja. Indikator yang aktivitas pendukungnya telah dilaksanakan pada Semester I menunjukkan tingkat penyerapan yang lebih tinggi, sedangkan indikator yang proses penilaiannya dilakukan pada akhir tahun atau masih memerlukan tahapan lanjutan memiliki realisasi anggaran yang relatif lebih rendah.

Secara umum, penggunaan anggaran telah diarahkan untuk mendukung seluruh sasaran kegiatan dan indikator kinerja secara proporsional. Hal ini tercermin dari telah terlaksananya berbagai kegiatan pendukung, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan kearsipan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan informasi publik, serta pengembangan inovasi pelayanan. Dengan demikian, realisasi anggaran pada Triwulan II tidak hanya menunjukkan

progres penyerapan dana, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target kinerja BRBIH Tahun 2026.

Ke depan, BRBIH akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan serta percepatan penyerapan anggaran pada semester II, khususnya untuk indikator-indikator yang pengukurannya dilakukan secara tahunan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keselarasan antara realisasi anggaran dan pencapaian target kinerja sehingga seluruh sasaran kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel pada akhir Tahun 2026.

2. Perubahan Anggaran (Revisi DIPA)

Dalam rangka menjaga fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, selama triwulan II tahun 2026 telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali revisi DIPA. Perubahan ini dilakukan untuk merespons kebijakan strategis kementerian. Rincian mengenai perubahan dan perkembangan pagu anggaran tersebut dirangkum dalam poin berikut:

Tabel 19. Rincian Revisi DIPA BRBIH Tahun 2026

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
Awal	Tanggal	1 Desember 2026	-
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	-
	Belanja barang	3.298.990.000	-
	Total	8.870.947.000	
1	Tanggal	1 Desember 2025	31 Desember 2025
	Belanja Pegawai	5.571.957.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.298.990.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	1 Program	2 Program
	Keterangan	Revisi Anggaran RO Khusus berdasarkan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1158/AG/AG.3/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran ROK Khusus Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan TA 2026	
2	Tanggal	31 Desember 2025	12 Februari 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000

DIPA	Poin Perubahan	Semula	Menjadi
	Belanja barang	3.303.778.000	3.303.778.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.870.947.000
	Program	2 Program	2 Program
	Keterangan	Revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Triwulan I pada Halaman III DIPA	
3	Tanggal	12 Februari 2026	23 April 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	3.303.778.000	2.879.102.000
	Total Anggaran	8.870.947.000	8.446.271.000
	Program	2 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi Efisiensi Anggaran berdasarkan : Surat Plt. Sekretaris Jenderal 504/SJ/RC.420/IV/2026 tanggal 12 April 2026 hal Tindak Lanjut Penghematan Belanja KKP TA 2026	
4	Tanggal	23 April 2026	7 Mei 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	2.879.102.000	2.879.102.000
	Total Anggaran	8.446.271.000	8.446.271.000
	Program	1 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi Penyesuaian Rencana Penarikan Dana Triwulan II pada Halaman III DIPA	
5	Tanggal	7 Mei 2026	25 Mei 2026
	Belanja Pegawai	5.567.169.000	5.567.169.000
	Belanja barang	2.879.102.000	3.011.979.000
	Total Anggaran	8.446.271.000	8.579.148.000
	Program	1 Program	1 Program
	Keterangan	Revisi pergeseran anggaran belanja operasional (52) antar satker dalam 1 Kanwil (pergeseran anggaran dari Satker BRPBATPP Bogor) sesuai dengan surat dari PLh Direktur Pelaksanaan Anggaran Kemenkeu Nomor S-224/PB.2/2026 Tanggal 25 Mei 2026 Perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	

Sumber: Aplikasi Myintress Kemenkeu

Berdasarkan Tabel Rincian Revisi DIPA Tahun 2026, perubahan anggaran yang dilakukan sepanjang Triwulan II menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BRBIH bersifat adaptif terhadap dinamika kebijakan

pemerintah dan kebutuhan pelaksanaan program. Revisi yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan struktur anggaran, tetapi juga memastikan bahwa alokasi dana tetap selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan operasional satuan kerja, serta kebijakan efisiensi belanja yang ditetapkan di tingkat kementerian.

Penyesuaian anggaran tersebut juga mencerminkan upaya BRBIH dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui penyempurnaan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesesuaian antara rencana dan realisasi pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih tertib, terukur, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan program.

Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada Triwulan II mengakibatkan penyesuaian pagu dan penyederhanaan struktur program. Namun demikian, BRBIH tetap mampu menjaga keberlangsungan pelaksanaan kegiatan prioritas melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, adanya penambahan anggaran melalui mekanisme pergeseran antar satuan kerja memberikan ruang fiskal yang lebih memadai untuk mendukung penyelesaian kegiatan prioritas pada semester berikutnya.

Secara keseluruhan, rangkaian revisi DIPA tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran BRBIH tidak hanya berorientasi pada penyesuaian administratif, tetapi juga diarahkan untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, serta memastikan pencapaian target kinerja organisasi tetap berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2026.



Bab 4

Penutup

IV. PENUTUP

A. Capaian Kinerja

Secara keseluruhan, capaian kinerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias (BRBIH) pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan progres yang baik dalam mendukung pencapaian target tahunan. Hal ini tercermin dari hasil pemantauan melalui aplikasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menyajikan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebagai indikator komposit atas pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian kinerja tersebut ditampilkan dalam Dashboard Kinerja BRBIH sebagai berikut.



Sumber : Aplikasi Kinerjaku 2026

Gambar 11. Dashboard Kinerjaku BRBIH level 3 BRBIH

Berdasarkan Dashboard Kinerja BRBIH Triwulan II Tahun 2026 pada gambar di atas, nilai NKO menunjukkan posisi yang berada pada kategori baik dengan nilai NKO sebesar 114,82%, yang ditunjukkan melalui indikator pada masing-masing komponen kinerja. Tampilan dashboard memberikan gambaran tingkat capaian terhadap target yang telah ditetapkan, di mana sebagian indikator telah menunjukkan progres awal yang positif.

Namun demikian, capaian tersebut masih bersifat sementara karena sebagian besar indikator kinerja memiliki periode pengukuran tahunan,

sehingga nilai pada triwulan II lebih mencerminkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dibandingkan hasil akhir. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengendalian dan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar seluruh indikator dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, dashboard kinerja ini tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis guna memastikan ketercapaian kinerja organisasi secara optimal pada akhir tahun anggaran, dengan rincian capaian indikator sebagai berikut.

Tabel 20. Capaian Kinerja BRBIH Tahun 2026

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026	TARGET TRIWULAN II 2026	CAPAIAN TRIWULAN II 2026	%
Nilai Kinerja Organisasi Triwulan II Tahun 2026						114,82
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86	86	86	100
		2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1	83	100	120
		3 Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5			
		4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75			
		5 Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1	76	90,66	119,29
		6 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71			
		7 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77	77	100	120
		8 Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1			
		9 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90			

Sumber: Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan Sasaran Kegiatan BRBIH menunjukkan perkembangan yang positif. Indikator-indikator yang memang dijadwalkan untuk diukur pada semester pertama telah menunjukkan hasil yang baik dan sebagian besar telah memenuhi bahkan melampaui target triwulanan. Hal tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan program, serta pengendalian kegiatan telah berjalan secara efektif sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Sementara itu, beberapa indikator belum memiliki nilai capaian pada periode pelaporan karena mekanisme pengukurannya bersifat tahunan. Indikator-indikator tersebut baru dapat dinilai setelah seluruh rangkaian kegiatan dan proses evaluasi oleh unit pembina maupun instansi penilai selesai dilaksanakan pada akhir tahun. Oleh karena itu, belum tersedianya capaian pada Triwulan II tidak menunjukkan rendahnya kinerja, melainkan merupakan konsekuensi dari karakteristik periode pengukuran masing-masing indikator.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan II sebesar 114,82 menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan kinerja BRBIH berada pada kategori sangat baik. Capaian tersebut menggambarkan bahwa indikator-indikator yang telah diukur mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja organisasi, sekaligus menunjukkan adanya keselarasan antara pelaksanaan program, pengelolaan anggaran, dan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Ke depan, BRBIH akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja, khususnya indikator yang pengukurannya dilakukan pada akhir tahun. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana, sehingga target kinerja organisasi Tahun 2026 dapat tercapai secara

optimal serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

C. Permasalahan dan Rekomendasi

BRBIH telah melakukan upaya pencapaian target kinerja Triwulan II di Tahun 2026. Hal ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target masing-masing IKU yang ditetapkan. Walaupun nilai kinerja organisasi pada triwulan II sudah masuk dalam kategori istimewa, nilai ini tentunya perlu dipertahankan atau ditingkatkan dengan melakukan pengawalan guna memastikan agar tidak terjadi penurunan kinerja di triwulan berikutnya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target salah satu indikator kinerja yaitu adalah pelaksanaan pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Proses pengumpulan dan verifikasi data dukung untuk penilaian KIP membutuhkan waktu, kompleksitas pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai ketentuan penilaian, serta keterbatasan sumber daya manusia yang menangani pengelolaan layanan informasi publik. Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mengoptimalkan penyusunan dokumen dan pemenuhan indikator penilaian.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penambahan sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung kegiatan pengelolaan data dan informasi, sehingga proses pengumpulan dan pemenuhan data dukung KIP dapat tersedia tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam penilaian.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BRBIH. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BRBIH. Akhirnya, BRBIH berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



Lampiran

LAPORAN
KINERJA
—
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
2026

KKP
2026
BANGUN STRONGER

BRBIH
Balai Riset Budidaya Ikan Hias



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brbih.depok@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR 17/BRBIH/RC.610/I/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu menetapkan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2026;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
 7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Sekretaris BPPSDM KP TA. 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026;
 - b. Ketua Tim Penyusun:
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

- c. Anggota Tim Penyusun:
Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2026;
- d. Sekretariat :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026 lingkup BRBIH.
- e. Kontributor:
Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

tanggal 15 Januari 2026

Kepala PEGUNA ANGGARAN



HARYADI D

Tembusan:

- 1. Sekretaris BPPSDM KP;
- 2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK

Nomor : 17/BRBIH/RC.610/1/2026

Tanggal : 15 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum
3	Anggota Tim Penyusun	1. Subkoordinator Kelopak Tata Operasional 2. Subkoordinator Kelompok Tata Usaha 3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis
4	Sekretariat	1. Shella Savitri 2. Iswahyudi 3. Susiyanti 4. Galuh Laksita Swasti 5. Ipan Dahniar
5	Kontributor	1. Ifana Agustina 2. Fitri Rahmawati 3. Dewinta Hesti Widyastantri

Ditetapkan di Depok

Tanggal 15 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN



ICENYARYADI D

Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

JALAN PERIKANAN NOMOR 13 PANCORAN MAS DEPOK 16436
TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL brbih.depok@kkp.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS
NOMOR 769/BRBIH/RC.610/VII/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj)
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan penanggung jawab kegiatan serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 dipandang perlu melakukan perubahan susunan organisasi dan uraian tugas serta penunjukan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias TA. 2026;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan terampil dalam melaksanakan tugas dan telah memenuhi syarat;

c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas tersebut diperlukan rasa tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias mengenai Perubahan Tim Penyusun Laporan Kinerja (LKj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

- 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 77/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Budidaya Ikan Hias;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;
 6. Surat Pengesahan DIPA Balai Riset Budidaya Ikan Hias Nomor: SP DIPA-032.12.2.403830/2026 Tanggal 1 Desember 2025;
 7. Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias dengan Sekretaris BPPSDM KP TA. 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PERUBAHAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA (LKj) BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab :
Bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026;
 - b. Ketua Tim Penyusun:
Melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja (LKj) BRBIH TA. 2026, sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Penanggung Jawab Tim Penyusun LKJ;

- c. Anggota Tim Penyusun:
Membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja BRBIH TA. 2026;
- d. Sekretariat :
Menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BRBIH Tahun 2026 lingkup BRBIH.
- e. Kontributor:
Menyampaikan data dan informasi dari unit kerja kepada Tim Penyusun Laporan kinerja (LKj)

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Penyusun Laporan Kinerja (Lkj) Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun Anggaran 2026 bertanggung jawab kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dapat dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal 1 Juli 2026

Kepala PANGUNA ANGGARAN



HARYADI D

Tembusan:

- 1. Sekretaris BPPSDM KP;
- 2. Pegawai yang bersangkutan.

- 4 -

Lampiran SK

Nomor : 769/BRBIH/RC.610/VII/2026

Tanggal : 1 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN	NAMA/JABATAN
(1)	(2)	(3)
1	Penanggung Jawab	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
2	Ketua Tim Penyusun	Sub Bagian Umum
3	Anggota Tim Penyusun	1. Subkoordinator Kelompok Tata Operasional 2. Subkoordinator Kelompok Tata Usaha 3. Subkoordinator Kelompok Pelayanan Teknis
4	Sekretariat	1. Shella Savitri 2. Galuh Laksita Swasti 3. Ipan Dahniar
5	Kontributor	1. Ifana Agustina 2. Fitri Rahmawati 3. Dewinta Hesti Widyastantri

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 1 Juli 2026

KEASA PENGUNA ANGGARAN



IGUARYADI D

Tembusan:

1. Sekretaris BPPSDM KP;
2. Pegawai yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : **Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias**
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : **Joni Haryadi D**
Jabatan : **Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (indeks)	82,1
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71
		7.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77
		8.	Proposal inovasi pelayanan publik BRBIH (Proposal)	1
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.870.947.000
Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2026		8.870.947.000

Jakarta, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Joni Haryadi D



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Gleni Hasan Huwoyon**

Jabatan : **Plt. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**

Jabatan : **Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 29 Juni 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA
Plt. Kepala Balai Riset Budidaya
Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gleni Hasan Huwoyon

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel dalam Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BRBIH (%)	86
		2.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	92,1
		3.	Penilaian Mandiri SAKIP BRBIH (nilai)	81,5
		4.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BRBIH (Nilai)	71,75
		5.	Indeks Profesionalitas ASN BRBIH (Indeks)	82,1
		6.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BRBIH (Nilai)	71
		7.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BRBIH (%)	77
		8.	Proposal Inovasi Pelayanan Publik BRBIH (Proposal)	1
		9.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BRBIH (Nilai)	90

Data Anggaran :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.579.148.000
Total Anggaran Balai Riset Budidaya Ikan Hias Tahun 2026		8.579.148.000

Jakarta, 29 Juni 2026

PIHAK KEDUA
Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

PIHAK PERTAMA
Pit. Kepala Balai Riset Budidaya
Ikan Hias



Ditandatangani
Secara Elektronik

Gleni Hasan Huwoyon



BRBIH

Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Pancoran
MAS, Kec. Pancoran Mas, Kota
Depok, Jawa Barat 16436

